

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Sultan Remy Sjahdeni, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 19 (Mei-Juni 2002)
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009)
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Agus Sardjono. *Pentingnya Sistem Persaingan Usaha Yang Sehatd Alam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian*, *Newsletter* No 34 Tahun IX, (Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998)
- Benny Pasaribu, *Kebijakan Industri Versus Kebijakan Persaingan*, *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, Edisi 2 (November 2009)
- KPPU RI, *press release: KPPU Mengeluarkan Peraturan Komisi Mengenai Kartel*, Jakarta: 12 Agustus 2010
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004
- Didik J. Rachbini, Antimonopoly and Fair Competition Law No.5/1999: Cartel and Merger Control In Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, 2002, hlm. 11, menyatakan bahwa: “*Cartel or horizontal price agreement is widely recognized as the most dangerous monopoly practices in the business world.*”
- Riris Munadiya, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 5, 2011
- Sacker dan Fuller, in Knud Hansen

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*,

Lihat juga: Agus Sardjono, “Pentingnya Sistem Persaingan Usaha yang Sehat dalam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian”, *Newsletter* No. 34 Tahun IX, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998),

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013

Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Kartel, *Jurnal Hukum Bisnis* (Maret-April 2005),

Eddy Pelupessy, *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Yogyakarta, Aksara Indonesia, 2008,

KPPU, *Kompetisi: Bertarung Melawan Kartel*, Jakarta, KPPU, 2013: Edisi 9

Ridho Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2014

Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014

Tresna P. Soemardi, *Kartel Internasional: Fenomena Kartel Internasional dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha dan Ekonomi Nasional*, *Jurnal KPPU* Edisi 2 Tahun 2009, (Jakarta: KPPU RI, 2009).

Marshall Sumantri, “Dugaan Praktek Kartel yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa Telepon Selular dalam Penetapan Tarif SMS (*Short Message Service*) Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009)

Muhamad Sadi is. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia KPPU*.

SETARA PRESS. 2016.,

Hari Prasetyo, “*Analisis Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Negara Bantu Di Indonesia*” (Untuk memperoleh gelar sarjana pada universitas Indonesia di Jakarta)

R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*,
(Bandung:Bandar Maju) 2005

Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004)

Satjipto Rahardjo dalam Muhamad Sadi, *Etika & Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

“*Pengertian kepastian hukum*” <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>. 1 Juli 2019

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU RI, *Peraturan komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli Usaha Tidak Sehat*, Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010

KPPU RI, *Press Release: KPPU Mengeluarkan Peraturan Komisi
Mengenai Kartel*, Jakarta: 12 Agustus 2010

Indonesia, *Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, LN. No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817

C. Website

Catatan YLKI Terhadap Putusan KPPU Soal Yamaha Honda,

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58aede10634f9/5-catatan-ylki-terhadap-putusan-kppu-soal-yamaha-honda>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018

Kelemahan dalam upaya membuktikan kartel ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan, sehingga KPPU kesulitan memperoleh bukti langsung dari aktivitas kartel. Lihat pula artikel mengenai hal ini dalam *Keterbatasan Wewenang KPPU Hambat Penuntasan Kartel*, Jakarta, 23 Maret 2013, ditelusuri melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51504b2ed3574/keterbatasan-wewenang-kppu-hambat-penuntasan-kartel> pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 22.21 WIB

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Jakarta, Jumat (11/3/2011) dalam artikel oleh Andi Saputra, *MA Akui Hakim Pengadilan Negeri 'Gagap' Hukum*

Persaingan, Jakarta: detikfinance, 11 Maret 2011, 21:37 WIB diakses melalui <http://finance.detik.com/read/2011/03/11/213715/1590079/4/ma-akui-hakim-pengadilan-negeri-gagap-hukum-persaingan?nd9911043> pada tanggal 13 Februari 2018

OECD, *Using Leniency to Fight Hardcore Cartel*, September 2011, ditelusuri melalui <http://www.oecd.org/daf/ca/1890449.pdf> pada tanggal 14 Februari 2018